ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.27.1.April (2019): 675-707
DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p25

Pengaruh Kualitas Aparatur Melalui SIMDA dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan BMD

Handia Fahrurrozi[1]
Akram[2]
Prayitno Basuki[3]

[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), NTB, Indonesia
e-mail: handia.imali@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan struktur organisasi berakibat pada perpindahan aset memiliki potensi *fraud.* Pencegahan merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk dalam meminimalisir tindakan *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dari kualitas aparatur pemerintah, peran SIMDA dan sistem pengendalian intern terhadap pencegah *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Populasi penelitian adalah pengurus barang dan ASN pada bidang pengelolaan BMD yang berjumlah 128 orang. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 80 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur dan SIMDA baik secara langsung dan maupun tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan aksi pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah.
Kata kunci: Kualitas aparatur; SIMDA; sistem pengendalian internal; pencegahan *fraud*

ABSTRACT

Changes in organizational structure result in the transfer of assets with potential fraud. Prevention is one of the long-term solutions to minimize fraud. This study aims to provide empirical evidence of the influence of the quality of government apparatus, the role of SIMDA and the internal control system on preventing fraud in the management of regional property. The population of the study was the management of goods and ASN in the field of management of BMD totaling 128 people. The sample selection uses purposive sampling with a total of 80 people. The results showed that the quality of the apparatus and SIMDA both directly and indirectly did not affect the prevention of fraud in managing regional property. Whereas, the internal control system influences fraud prevention. The implications of this research can be used as input material for regional governments in developing programs and fraud prevention actions for regional property management.
Keyword: *Quality of apparatus; SIMDA; internal control system; fraud prevention*.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan, oleh Kementerian Reformasi dan

Birokrasi dinilai berdasarkan tata kelola organisasi pemerintahan. Setiap organisasi pemerintah diharapkan dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Pemerintah mengingat subjek utama dari tata kelola adalah Aparatur Pemerintah. Selain reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari sisi pengelolaan keuangan. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur dan berdampak pada kerugian keuangan negara salah satunya disebabkan oleh lemahnya tata kelola keuangan, baik itu dari sisi peraturan perundang-undangannya, sistem pencatatan serta kurangnya lembaga-lembaga yang mengawasi proses pengelolaan keuangan tersebut.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku *fraud* yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memperdaya orang lain. (Marks, 2009) menyebutkan bahwa motivasi seseorang melakukan *fraud* terdiri dari: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi. Laporan *The Institute of Internal Audit* tahun 2009 mengidentifikasi beberapa contoh *fraud* yang terdiri dari: penggelapan aset, *skimming, disbursement, conflict of interest, diversion,* penyuapan, kecurangan dalam pengembalian pembayaran, penggelapan pajak, dan *unauthorized/illegal used* (IIA, 2009). Dari sekian banyak contoh *fraud* tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam yaitu: korupsi, penggelapan aset dan laporan yang menyesatkan (Sudarmono, Sarwandi, & Yulianto, 2008).

Potensi *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah muncul manakala perubahan peraturan terkait Pemerintah Daerah yang mengharuskan adanya

perubahan struktur organisasi pada perangkat daerah. Perubahan struktur organisasi ini menyebabkan adanya penggabungan, peleburan dan pembubaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk juga dengan perpindahan barang milik daerah yang dikelola. Selain perubahan struktur organisasi tersebut, perubahan peraturan juga berakibat pada berpindahnya pengelolaan pendidikan menengah, kehutanan dan perhubungan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Provinsi (Ps. 15 ayat (1) UU 23 tahun 2014). Perpindahan ini berakibat pada penyerahan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Kabupaten/Kota menjadi aset provinsi.

Dalam banyak strategi melawan serta mencegah *fraud* terdapat dua unsur utama yang paling sering dikemukakan yaitu: etika dan penguatan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi. Seperti yang dikemukan oleh (CIMA, 2008) bahwa upaya untuk dapat meminimalisir motif pelaku *fraud*, menghilangkan kesempatan dan mempersempit ruang gerak dari para pelaku *fraud* dalam menjalankan aksinya adalah dengan cara memperkuat sistem pengendalian intern. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyetti, 2009), (Junaidi, 2017) dan (Nurhasanah, 2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berperan dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua segmen yakni pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (Al-Zwyalif, 2015). Pengendalian aplikasi dapat mencegah, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan karena error dan kecurangan (Al-Zwyalif, 2015). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan

skema yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari pengendalian aplikasi dengan dua aplikasi utama untuk keuangan dan aset daerah yakni SIMDA-Keuangan dan SIMDA-BMD. Penelitian tentang peran sistem informasi dilakukan oleh (Al-Hiyari, Al-Mashregy, & Mat, 2013), (Rapina, 2014) dan (Fitriati & Mulyani, 2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Namun, penelitian tersebut tidak menguji pengaruh sistem informasi terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini setidaknya memiliki tiga kebaruan, pertama menggunakan SIMDA sebagai variabel penghubung antara kualitas aparatur dan pencegahan *fraud*. Kedua, penelitian ini menguji peranan SIMDA pada saat fungsi SIMDA sebagai aplikasi penatausahaan barang milik daerah telah menggunakan basis pencatatan secara akrual. Ketiga, adanya perubahan struktur organisasi yang menyebabkan adanya potensi *fraud* karena perpindahan aset antar organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah penelitian yang harus dijawab adalah sebagai berikut: 1. Apakah kualitas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah? 2. Apakah kualitas aparatur melalui SIMDA berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah? 3. Apakah SIMDA berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah? 4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah?.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai signifikansi pengaruh dari kualitas aparatur pemerintah, peran SIMDA dan sistem pengendalian intern terhadap pencegah *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi dan teori *fraud pentagon* sebagai landasan teoritis.

Weber mengungkapkan bahwa legitimasi kekuasaan dapat dibedakan menjadi tiga yakni: otoritas tradisional, otoritas kharismatik dan otoritas legal rasional. Suatu organisasi akan ideal bilamana memiliki beberapa unsur antara lain: aturan-aturan dan prosedur formal, spesialisasi pekerjaan, kejelasan hierarki, pengembangan karier berdasarkan *merit system*, *impersonality*, objektivitas dan kegiatan administratif. Sebagai tipe ideal, bentuk birokrasi dari Weber memang menjanjikan keunggulan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Dengan birokrasi idealnya posisi-posisi tertentu akan diisi melalui proses seleksi yang didasarkan pada keahlian (Sudarso, 2009).

Merujuk pada pandangan Weber tentang karakteristik ideal birokrasi, kompetensi merupakan salah syarat agar sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur dapat meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan pelayanan, sehingga rasionalisasi *fraud* karena *human error* dapat diminimalisir. Selain itu, adanya spesialisasi pekerjaan juga akan memudahkan pengawasan baik secara vertikal maupun horizontal antar teman sejawat. Oleh karena itu, potensi *fraud* dari sisi kesempatan juga dapat diminimalisir. Karakteristik ideal birokrasi yang dikemukan oleh Weber memiliki keunggulan dalam efisiensi dan efektifitas organisasi.

Selain teori birokrasi, penelitian ini juga melihat sisi pencegahan *fraud* dari motivasi pelaku melakukan tindakan *fraud* berdasarkan teori *fraud* antara lain: pertama *fraud triangle* (Cressey, 1950) yang terdiri dari 3 motif yaitu: (1) tekanan/*pressure*; (2) kesempatan/*opportunity*; (3) rasionalisasi/ *rationalization*. Kedua, (Albrecht, Howe, & Romney, 1984) yang disebut dengan *Fraud Scale* yang terdiri dari tiga faktor penyebab *fraud* yakni: (1) *situasional pressure;* (2) *opportunity to commit fraud;* (3) *personal integrity*. *Modern Fraud Theories* merupakan perkembangan lanjutan dari teori *fraud* yang terdiri dari : (1) *A-B-C Analysis ;* (2) *M.I.C.E model* dan (3) *Fraud Diamond*. (Ramamoorti, 2003) menyatakan bahwa terdapat 3 tipe *fraud* yang dideskripsikan sebagai: *a bad apple, a bad bushel, and a bad crop*.

Perkembangan terbaru tentang teori *fraud* di ungkapkan oleh (Marks, 2009) dimana terdapat lima unsur yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Kelima unsur tersebut adalah tekanan, kesempatan, rasionalitas, arogansi dan kompetensi. Pada salah satu publikasinya crowe organization menyatakan program antifraud yang paling relevan untuk organisasi pada saat sekarang adalah program yang berfokus untuk meminimalisasi kesempatan pelaku untuk melakukan *fraud* khususnya dengan memanfaatkan pengaruh untuk keuntungan pribadi. Salah satu cara untuk menuntup kesempatan pelaku untuk melaksanakan *fraud* adalah dengan meningkatkan integritas dari aparatur, menerapkan sistem informasi (SIMDA), dan yang paling utama menguatkan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan landasan teoritis di atas secara sistematis rerangka konseptual penelitian yang dibuat dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini.

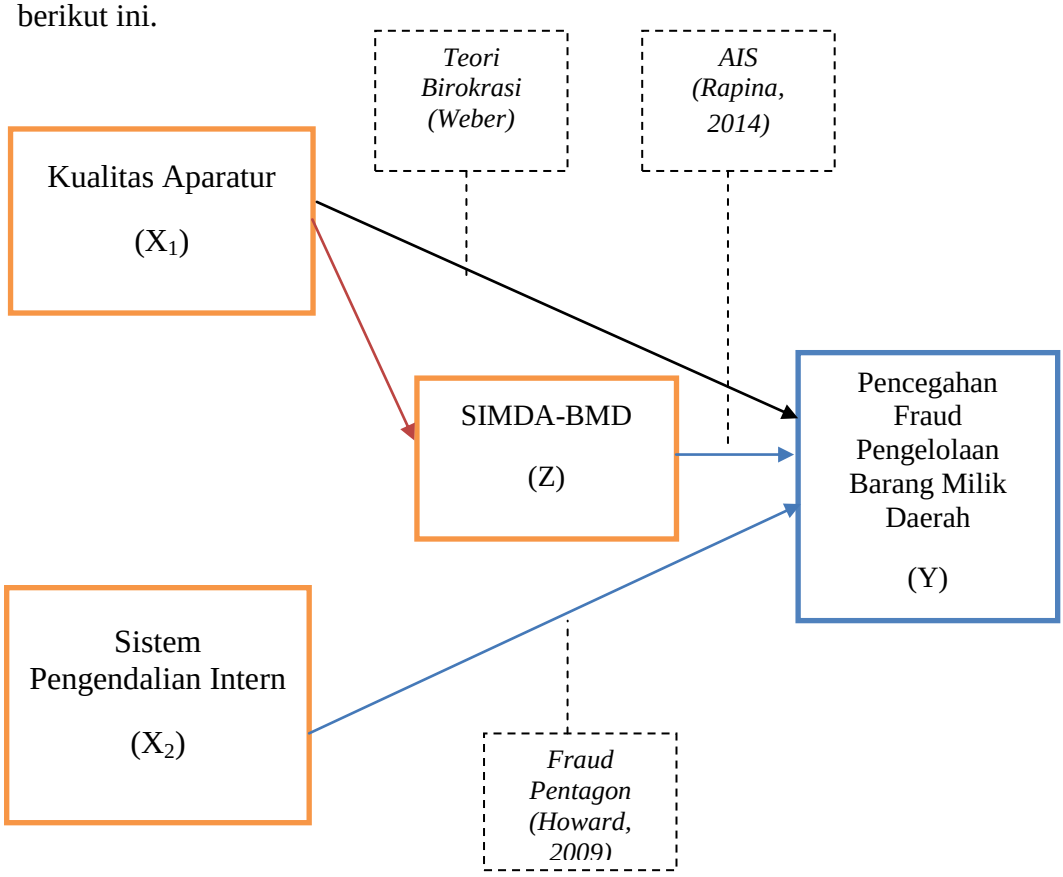

Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Data diolah, 2019

Inti utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah perbaikan dari aparatur pemerintah, dimana salah satu tujuannya adalah agar dapat meminimalisir bahkan menghilangkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Namun, dalam banyak kasus *fraud* yang menjadi motif utamanya adalah keserakahan dari pelaku *fraud*, baru setelah itu karena faktor kebutuhan, adanya kesempatan serta adanya akses untuk melakukan tindakan *fraud* karena lemahnya penindakan. Oleh Karena itu, menurut (CIMA, 2008) ada dua elemen utama yang diperlukan untuk dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu

perbaikan etika dan penguatan sistem pengendalian intern organisasi. Perbaikan etika sangat erat kaitannya dengan aparatur pemerintah, oleh karena itu terkait dengan kualitas aparatur dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Semakin meningkat kualitas aparatur pemerintah maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah

Integritas merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah. Lemahnya integritas dapat mengakibatkan aparatur lakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Faktor penyebab *fraud* seperti kompetensi dan arogansi dalam *fraud* pentagon (Marks, 2009) disebabkan salah satunya karena lemahnya integritas. Bagaimana baiknya suatu sistem pengendalian dan sistem informasi (SIMDA) tetaplah sebuah instrument yang point pentingnya terletak pada siapa dan bagaimana instrument itu dilaksanakan. Jika dilaksanakan dengan baik maka hasilnya pun akan baik begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kualitas aparatur yang menjalankan SIMDA haruslah memiliki kualitas yang cukup agar dapat memaksimalkan fungsi SIMDA dalam mencegah terjadinya *fraud*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturun adalah sebagai berikut:

H_2 : Semakin meningkat kualitas aparatur pemerintah melalui penggunaan SIMDA maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Al-Zwyalif, 2015) pencegahan terhadap suatu kecurangan dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian salah satu pengendalian aplikasi melalui SIMDA. Beberapa penelitian lain seperti (Rapina, 2014), (Al-Hiyari et al., 2013), (Fitriati & Mulyani, 2015) mengungkapkan bahwa

penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap peningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di Pemerintah Provinisi Nusa Tenggara Barat, dimana setelah menggunakan SIMDA kuliatas laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya jika kualitas informasi yang dihasilkan sudah tidak ada salah saji material (opini WTP) maka dapat diasumsikan tidak terdapat kemungkinan terjadinya *fraud* dalam organisasi tersebut.

H_3 : Semakin baik penggunaan SIMDA maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah.

Motivasi seorang melakukan *fraud* terbagi ke dalam lima unsur yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, arogansi dan kompetensi. Dalam banyak kasus kesempatan merupakan faktor utama yang menyebabkan orang melakukan tindakan *fraud* dan faktor kesempatan juga yang menjadi pemicu motivasi-motivasi lain seperti rasionalisasi, tekanan, arogansi dan kompetensi. Kesempatan secara luas didefinisikan sebagai adanya ruang bagi pelaku untuk berbuat kecurangan baik itu karena lemahnya pengawasan, tidak berjalan atau tidak adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Oleh karena itu, dalam salah satu saran yang dimunculkan untuk dapat mencegah terjadi *fraud* adalah dengan meminimalisasi atau bahkan menutup peluang untuk pelaku melakuan tindakan *fraud* yang hal ini bermakna bahwa diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien untuk membentengi atau mengurangi kesempatan pelaku untuk berbuat *fraud*.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian (Hermiyetti, 2009), (Junaidi, 2017), (Handayani, Tarjo, & Rimawati,

2017) , (Nurhasanah, 2017) menyatakan bahwa pengendalian intern berperan dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi terjadi *fraud*. Pengendalian intern yang efektif berhubungan negatif dengan *fraud* (Prawira, T.Herawati, & Darmawan, 2014), (Meliany & Hernawati, 2013). Artinya, jika pengendalian intern semakin kuat maka kesempatan untuk melakukan *fraud* menjadi semakin kecil. Oleh karena, kesempatan merupakan elemen penting dari *fraud* yang terjadi akibat dari kelemahan sistem pengendalian intern (Puspasari, 2017). Dengan demikian, hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H_4 : Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitain terapan. Sementara itu, jika ditinjau dari tingkat alamiahnya maka penelitian ini termasuk penelitian survey, karena sebagaimana yang dikemukan oleh (Sugiyono, 2014) bahwa penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Populasi penelitian merupakan pengurus barang dan pengurus barang pembantu pada OPD serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Pengelolaan BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Populasi penelitian berjumlah 128 orang yang terdiri dari 115 orang pengurus barang dan 13 orang ASN Bidang BMD. Pengambilan

sampel penelitian menggunakan teknik *non probability sampling* yakni *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan ditunjukkan oleh tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel
1	Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu OPD/UPTD/B
2	Bidang Pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
3	OPD/UPTD/B yang berada diwilayah Pulau Lombok
4	OPD/UPTD/B yang memiliki nilai total aset per 31 Desember 2017 lebih besar dari 5 miliar

Sumber: Data diolah, 2019

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Analisis data dilaksanakan setelah data dari responden atau sumber lain terkumpul. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu *statistic descriptive,* dan *statistic inferensial* (Sugiyono, 2014).

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis data menggunakan statistik inferensial dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan jenis data yang diolah yakni statistik parametrik dan nonparametrik. Menurut (Sugiyono, 2014) statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Laeast Squares* dengan aplikasi *SmartPLS 3.2.6.*

Tahapan analisis menggunakan *SmartPLS* melalui 5 (lima) tahapan yaitu: (1) konseptualisasi model, (2) menentukan metode analisis algorithm, (3)

menentukan metode resampling, (4) menggambar diagram jalur, dan (5) evaluasi model. Konseptulisasi model terdiri atas model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Sementara itu, metode resampling menggunakan *metode bootstrapping*. Tahap keempat adalah menggambar diagram jalur sebagaimana sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2 berikut ini.

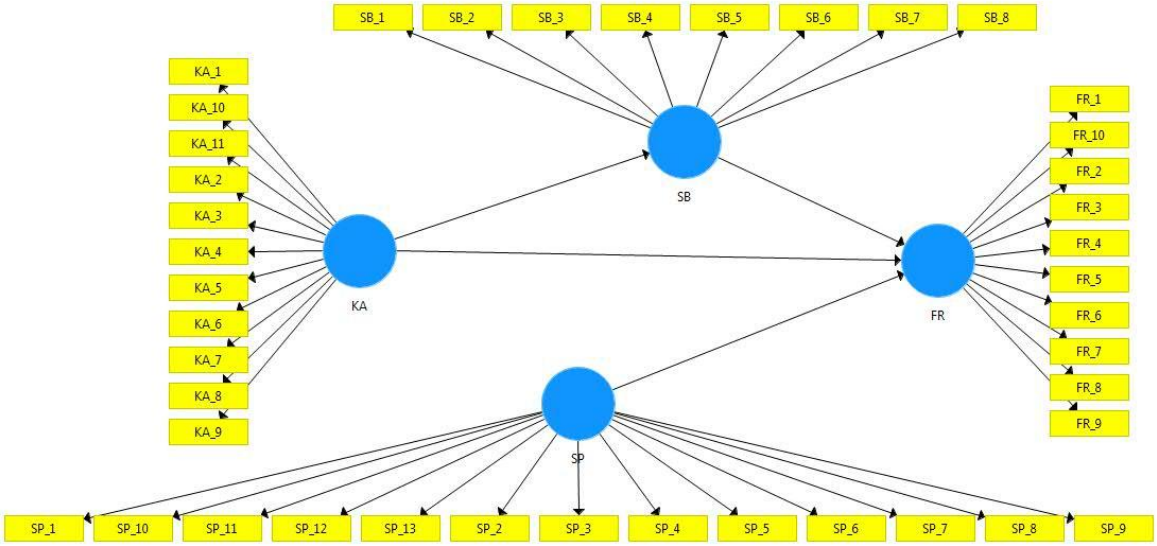

Gambar 2. Diagram Jalur

Sumber : Data diolah, 2019

Persamaan model penelitian yang dibentuk dapat diuraikan sebagai berikut.

$FR = \gamma_1 KA + \gamma_2 SB + \gamma_3 SP + \zeta$ …… (1)

Keterangan:
FR : Pencegahan *Fraud* Pengelolaan BMD
KA : Kualitas Aparatur
SB : SIMDA-BMD
SP : Sistem Pengendaian Intern
γ : Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen
ζ : Galat pengukuran variabel structural

Tahapan kelima adalah evauasi model penelitian. Evaluasi model penelitian dilakukan terhadap model pengukuran (*outer model*), model struktural

(*inner model*) dan pengujian model struktural. Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sementara itu, evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten (Ghozali & Latan, 2015). Evaluasi model pengukuran paling tidak melalui tiga jenis pengujian yakni: *covergent validity, discriminant validity,* dan Uji reliabilitas. Sementara itu, evaluasi model struktural terdari: R-*Squares* (R^2) dan *Predictive relevance* (Q^2). Sedangkan pengujian model struktural terdiri atas: Uji *inner model* dan pengujian efek mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk kontruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya. Uji validitas *convergent* indikator reflekstif dapat dilihat dengan nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Menurut (F. Hair Jr, el al. 2014:101) pada kondisi tertentu nilai *loading factor* antara 0.4 - 0.7 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan dengan memperhatikan kontribusinya terhadap validitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua butir pernyataan memenuhi unsur sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Hasil Uji *Convergent Validity*

No	Variabel/Indikator	Nilai *Outer Loading*	Keterangan
Kualitas Aparatur			
1	KA_1	0.456	Memenuhi *convergent validity*
2	KA_2	0.454	Memenuhi *convergent validity*
3	KA_3	0.557	Memenuhi *convergent validity*
4	KA_4	0.692	Memenuhi *convergent validity*
5	KA_5	0.591	Memenuhi *convergent validity*
6	KA_6	0.547	Memenuhi *convergent validity*
7	KA_7	0.693	Memenuhi *convergent validity*
8	KA_8	0.680	Memenuhi *convergent validity*
9	KA_9	0.691	Memenuhi *convergent validity*
10	KA_10	0.592	Memenuhi *convergent validity*
11	KA_11	0.464	Memenuhi *convergent validity*
SIMDA BMD			
1	SB_1	0.770	Memenuhi *convergent validity*
2	SB_2	0.691	Memenuhi *convergent validity*
3	SB_3	0.589	Memenuhi *convergent validity*
4	SB_4	0.627	Memenuhi *convergent validity*
5	SB_5	0.691	Memenuhi *convergent validity*
6	SB_6	0.769	Memenuhi *convergent validity*
7	SB_8	0.585	Memenuhi *convergent validity*
Sistem Pengendalian Internal			
1	SP_1	0.786	Memenuhi *convergent validity*
2	SP_2	0.757	Memenuhi *convergent validity*
3	SP_3	0.815	Memenuhi *convergent validity*
4	SP_4	0.805	Memenuhi *convergent validity*
5	SP_5	0.459	Memenuhi *convergent validity*
6	SP_6	0.676	Memenuhi *convergent validity*
7	SP_7	0.593	Memenuhi *convergent validity*
8	SP_8	0.693	Memenuhi *convergent validity*
9	SP_11	0.839	Memenuhi *convergent validity*
Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Barang Milik Daerah			
1	FR_1	0.600	Memenuhi *convergent validity*
2	FR_2	0.574	Memenuhi *convergent validity*
3	FR_3	0.821	Memenuhi *convergent validity*
4	FR_4	0.805	Memenuhi *convergent validity*
5	FR_5	0.670	Memenuhi *convergent validity*
6	FR_6	0.642	Memenuhi *convergent validity*
7	FR_8	0.413	Memenuhi *convergent validity*
8	FR_9	0.507	Memenuhi *convergent validity*
9	FR_10	0.578	Memenuhi *convergent validity*

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian selanjutnya pada tahap evaluasi model pengukuran adalah pengujian *discriminant validity*. Hasil pengujian *discriminant validity* dapat dilihat pada nilai *cross loading*, kriteria yang disyaratkan adalah nilai dari *cross*

loading untuk setiap variabel harus lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi terhadap indikator laten lainnya. Berdasarkan hasil pengujian dimukan bahwa nilai *cross loading* dari masing-masing indikator penelitian lebih besar daripada nilai korelasi variabel laten lainnya kecuali pada KA1 yang nilai *cross loading*-nya lebih rendah daripada korelasi pada variabel laten sistem pengendalian internal.

Tahapan terakhir dari evaluasi model pengukuran adalah uji reliabilitas yang dilakukan dengan melihat nilai dari *composite reliability*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian adalah reliabel. Hasil pengujian *composite reliability* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Kualitas Aparatur	0.852	Reliabel
Pencegahan Fraud	0.854	Reliabel
SIMDA BMD	0.855	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.906	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2019

Setelah melaksanakan evaluasi terhadap model pengukuran tahapan selanjutnya adalah evaluasi terhadap model struktural (*inner model*). *Inner model* dievaluasi dengan melihat besarnya presentase *variance* yang disajikan yaitu dengan melihat nilai R-*Square* untuk konstruk laten endogen, untuk melihat kekuatan prediksi dari model structural. Model structural dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: ≥ 0.75 merupakan model yang kuat ≥ 0.50 sampai ≥ 0.75

diklasifikasikan moderat dan ≤ 0.50 adalah lemah. Berikut adalah hasil pengujian dari R-*Square* sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Pengujian R-*Square* (R^2)

Konstruk	*R-Square* (R^2)	Keterangan
FR	0.534	Moderat
SB	0.391	Lemah

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil pengujian R-*square* menunjukkan bahwa variabel laten eksogen yakni: kualitas aparatur, SIMDA-BMD, dan sistem pengendalian internal hanya dapat menjelaskan variabel endogen yaitu pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah sebesar 53%. Artinya, terdapat 47% variabel endogen tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kemampuan menjelaskan sebesar 53% dalam klasifikasi R-square dikategorikan moderat atau cukup dapat terjelaskan.

Selanjutnya, *test* untuk menguji *predictive relevance* (Q^2). Nilai Q^2 dapat diklasifikasikan menjadi 3 yakni model lemah, moderat dan kuat jika nilai Q^2 adalah 0.02, 0.15 dan 0.35. Berikut adalah nilai *predictive relevance* dilakukan melalui analisis *blindfolding* untuk mengetahui nilai *crosvalidated communality* sebagaimana ditunjukkan tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Analisis *Blindfolding*

Konstruk	SSO	SSE	Q^2 (1-SSE/SSO)
Kualitas Aparatur	792.000	625.102	0.211
Pencegahan Fraud	648.000	495.683	0.235
SIMDA BMD	504.000	365.956	0.274
Sistem Pengendalian Internal	648.000	437.018	0.326

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai Q^2 masing-masing variabel laten adalah lebih besar dari 0 (nol), sehingga dapat dijelaskan bahwa

model penelitian ini memenuhi *predictive relevance*. Hal ini mengindikasikan bahwa data siap dilanjutkan ke tahap pengujian *inner model* selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.

Setelah melakukan evaluasi model struktural selanjutnya dilakukan pengujian terhadap model struktural melalui prosedur *bootstrap*. Nilai signifikansi yang digunakan (*two-tailed*) dengan t-*value* 1.96. Berikut adalah hasil evaluasi dan pengujian model struktrual sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 sebagai berikut.

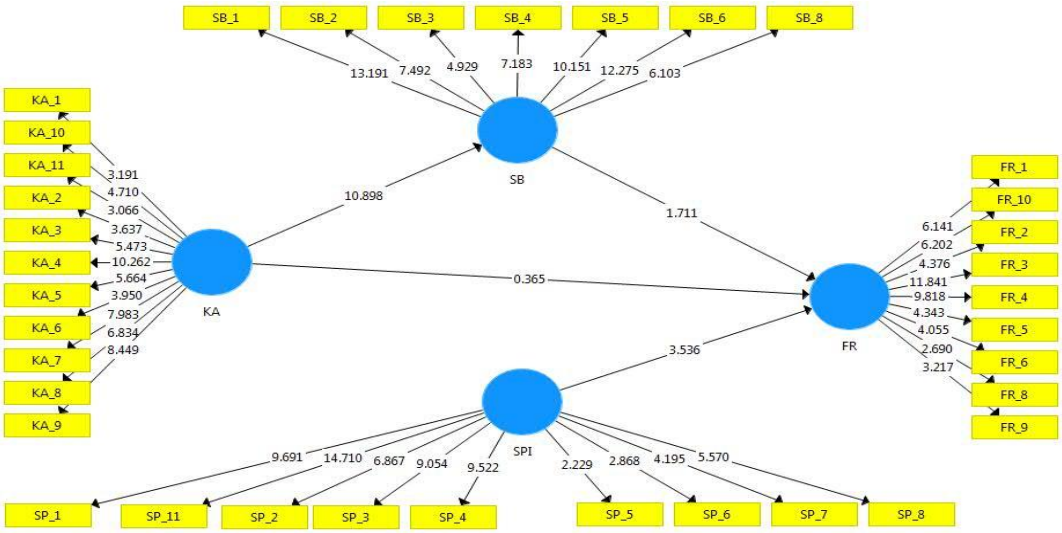

Gambar 3. Hasil Evaluasi Model Struktural

Sumber : Data diolah, 2019

Pengujian *inner model*, evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel melalui prosedur *bootstrapping*. Hasil pengujian hipotesis diperoleh dengan cara membandingkan nilai dari t-statistik pada hasil *bootstrapping* dengan tingkat kepercayaan 95% dibandingkan dengan nilai dari t-tabel. Untuk derajat kepercayaan 95% nilai dari t-tabel adalah 1.96, oleh karena itu hipotesis penelitian akan diterima jika t-statistik >1.96.

Selain itu, hasil pengujian hipotesis juga dapat dilihat dari nilai p *value*, dimana hipotesis dapat diterima jika nilai dari p *value* < *error* atau tingkat kesalahan yang masih diperbolehkan yakni sebesar 5% (karena derajat kepercayaan 95%). Berikut disajikan hasil dari pengujian hipotesis sebagaimana ditunjukkan tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Variabel	Sample	Mean	STDEV	T Statistics	P Values	Keterangan
KA -> FR	0.041	0.052	0.113	0.365	0.715	Tidak Signifikan Hipotesis ditolak
KA -> SB	0.626	0.646	0.057	10.898	0.000	Signifikan
KA -> FR	0.126	0.135	0.075	1.670	0.095	Tidak Signifikan Hipotesis ditolak
SB -> FR	0.201	0.211	0.117	1.711	0.088	Tidak signifikan Hipotesis ditolak
SPI -> FR	0.564	0.550	0.159	3.536	0.000	Signifikan Hipotesis diterima

Sumber: Data diolah, 2019

Hipotesis pertama menyatakan bahwa semakin meningkat kualitas aparatur pemerintah maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Artinya, pencegahan *fraud* memiliki hubungan searah dengan kualitas aparatur. Jika terjadi peningkatan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah secara kualitatif maka hal tersebut juga akan berdampak kepada semakin baiknnya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pengujian terhadap kualitas aparatur dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung nilai t-statisik variabel kualitas aparatur sebesar 0,365 dengan nilai p *value* sebesar 0,715. Hasil tersebut tidak memenuhi kriteria hipotesis yang ditetapkan pada

pengujian dengan derajakat kepercayaan 95% dan alpa (α) 5% yaitu nilai t-statistik > 1.96 dan p *value* <0,05. Dengan demikian, maka hipotesis pertama dinyatakan ditolak. Namun, jika melihat dari arah hubungan antara kualitas aparatur dan pencegahan *fraud* sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.19 pada nilia koefisien parameter menunjukkan nilai +0,041. Artinya, jika terdapat peningkatan terhadap kualitas aparatur dalam pengelolaan barang milik daerah maka semakin baik pencegahan *fraud* yang ada dalam organisasi tersebut.

Perbaikan kualitas aparatur merupakan inti utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi dimana tujuan dari peningkatan kualitas aparatur adalah agar dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh apartur pemerintah.Pada teori *fraud pentagon* disebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan tindakan adalah kompetensi dan arogansi. Pada teori *fraud diamond* juga disebutkan bahwa lemahnya integritas merupakan faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*.

Walaupun dalam hasil penelitian ini hipotesis pertama ditolak, namun hasil penelitian ini masih sejalan dan mendukung teori *fraud* baik itu *fraud pentagon, fraud diamond* maupun *gone theory*. Oleh karena, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara variabel eksogen kualitas aparatur dengan variabel endogen pencegahan *fraud* adalah searah. Hasil ini juga sejalan dengan pemaparan yang disampaikan oleh (CIMA, 2008) yang menyatakan bahwa terdapat dua elemen utama yang diperlukan untuk mencegah terjadinya *fraud* yaitu perbaikan etika dan penguatan sistem pengendalian internal. Hasil penelitian

ini juga sejalan dengan teori birokrasi yang dikemukan oleh weber, dalam karakteristik ideal sebuah birokrasi menurut Weber, penempatan aparatur harus didasarkan pada kemampuan teknis, tanpa memperhatikan koneksi, hubungan keluarga dan favoritisme. Kualitas aparatur seperti ini akan menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari.

Adapaun, terhadap penolakan hipotesis penelitian kemungkinan dapat sebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengujian terhadap kualitas aparatur dilaksanakan pada level pelaksana teknis (pengurus barang), pada tingkat ini mempuyai beberapa keterbatasan untuk mengobservasi pencegahan *fraud* karena pengurus barang tidak memiliki akses dalam menentukan kebijakan organisasi. Namun, karena penelitian ini juga menekankan pada pengaruh tidak langsung kualitas aparatur melalui SIMDA BMD, maka keputusan pengurus barang menjadi sampel penelitian adalah tepat. Kedua, dalam statistik deskriptif ditemukan bahwa kompetensi teknis yang dimiliki oleh pengurus barang di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan belum ada kemandirian aparatur dalam mengoperasikan SIMDA BMD. Sehingga, pengurus barang masih membutuhkan bantuan orang lain dalam mengoperasikan SIMDA BMD. Tentunya, hal tesebut dapat menjadi salah satu celah untuk terjadinya tindakan *fraud* karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Hal ini juga dikonfirmasi dengan minimnya jumlah pelatihan, seminar, ataupun *workshop* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan kemampuan teknis pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa semakin meningkat kualitas aparatur pemerintah melalui penggunaan SIMDA maka akan semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Artinya, dengan meningkatnya kualitas aparatur melalui penggunaan SIMDA BMD, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah semakin baik.

SIMDA BMD merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa penatausahaan barang milik daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penggunaan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang mengharuskan setiap data yang ter-*entry* ke dalam SIMDA harus didukung dengan dokumen yang cukup, baik itu kontrak, spesifikasi barang, serah terima serta pembayaran. Sehingga SIMDA BMD dapat digunakan sebagai salah satu media pengawasan terhadap belanja yang dilakukan oleh organisasi. Namun, sebagai sebuah sistem SIMDA tidak dapat berjalan sendiri, oleh karena itu efektifitas dari penggunaan SIMDA sangat bergantun dari operatornya dalam hal ini adalah pengurus barang dimasing-masing OPD.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-statistik variabel kualitas aparatur dengan pengujian tidak langsung melalui SIMDA BMD sebesar 1,670 dengan nilai p *value* sebesar 0,095. Sementara itu, kriteria yang ditetapkan pada pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% dan alpa (α) 5% adalah nilai t-statistik >1.96 dan nilai p *value* < 0,05. Hasil ini tentu lebih rendah dari

kriteria hipotesis yang ditetapkan yaitu t-statistik > 1.96 dan lebih besar dari p *value*. Oleh karena itu, hipotesis kedua juga dinyatakan ditolak.

Walupun demikian, arah hubungan pengujian variabel mediasi ini masih sesuai dengan teori serta penelitian terdahulu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter pada tabel 4.19 yaitu sebesar 0,126 ke arah positif. Artinya jika, terjadi peningkatan pada kualitas aparatur dalam penggunaan SIMDA maka pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah akan semakin kuat. Selain itu, penolakan hipotesis juga lebih disebabkan karena peneliti menggunakan kriteria pengujian dengan derajat kepercayaan 95%, jika menggunakan tingkat kepercayaan 90% maka hasil pengujian ini dapat diterima.

Pengunaan SIMDA BMD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh pengurus barang secara frekuensi memang sangat minim yakni pada saat pengurus barang melakukan rekonsiliasi barang milik daerah setiap semesternya. Sehingga, praktis pengunaan SIMDA hanya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Dengan demikian, bisa saja tidak terlihat secara nyata peranan SIMDA dalam pencegahan *fraud*, asumsi ini tentu dapat menjelaskan ditolaknya hipotesis penelitian yang kedua ini. Selain itu, dalam statistik deskriptif pada indikator kemampuan teknis profesional dan pengalaman dalam pengunaan SIMDA pada butir pernyataan 5-10 (tabel 4.5) rata-rata jawaban responden adalah cukup baik dan baik. Artinya, mayoritas responden dari sisi kemampuan teknis masih butuh untuk ditingkatkan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori *fraud* yang dikemukan oleh (Marks, 2009) bahwa motivasi seseorang melakukan tindakan *fraud* dibagi

menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terdiri atas tekanan, kompetensi dan arogansi. Kompetensi yang dimaksudkan dalam teori *fraud pentagon* adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tindakan *fraud* baik itu karena posisi ataupun kewenangan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur melalui SIMDA memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Jika dikaitkan dengan teorinya Marks maka, hal ini mungkin dapat disebabkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pengurus barang sebagai sampel penelitian dan minimnya frekuensi penggunaan SIMDA. Sehingga bentuk pencegahan dari tindakan *fraud* khususnya terkait penggelapan asset pengaruhnya tidak berdampak secara nyata terhadap organisasi.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa semakin baik penggunaan SIMDA maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Artinya, semakin baik suatu sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah maka pencegahan terhadap tindakan *fraud* khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah semakin kuat. Mekanisme pencegahan *fraud* melalui suatu sistem informasi diperoleh melalui transparansi proses dan kemanan basis data yang dimiliki oleh organisasi. Penggunaan SIMDA BMD akan membuat seluruh proses pengadaan organisasi akan terdokumentasi dengan baik sehingga evaluasi atau pengawasan dapat dilakukan oleh setiap aparatur. Dengan demkian, resiko kehilangan asset dari proses pengadaan dapat terpantau. Begitu juga dengan keamanan basis data, penggunaan SIMDA BMD menyimpan data-

data terkait barang inventaris yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah sampai dengan distrubusi barang tersebut ke setiap ruangan yang ada di organisasi. Sehingga resiko penggelapan asset oleh aparatur dapat dipantau dari setiap Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang termuat dalam SIMDA BMD.

Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel SIMDA BMD menghasilkan nilai t-statistik sebesar 1,711 dan nilai p *value* sebesar 0,088. Pengujian hipotesis terhadap variabel eksogen ini menggunakan kriteria yang sama dengan variabel sebelumnya dimana tingkat kepercayaan adalah 95% dengan alpa (α) sebesar 5%. Oleh karena itu, agar hipotesis dapat diterima nilai dari t-statistik > 1,96 dan nilai dari p *value* < 0,05. Oleh karena, hasil penelitian tidak memenuhi kriteria pengambilan keputusan dalam hipotesis, maka hipotesis ketiga ini juga dinyatakan ditolak.

Walupun demikian, arah hubungan pengujian variabel eksogen ini masih sesuai dengan teori serta penelitian terdahulu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter pada tabel 4.19 yaitu sebesar 0,201 ke arah positif. Artinya jika, terjadi peningkatan dalam penggunaan SIMDA maka pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah akan semakin kuat. Selain itu, penolakan hipotesis juga lebih disebabkan karena peneliti menggunakan kriteria pengujian dengan derajat kepercayaan 95%, jika menggunakan tingkat kepercayaan 90% maka hasil pengujian ini dapat diterima.

Belum maksimalnya peran SIMDA BMD dalam pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah sebagaimana hasil pengujian hipotesis dapat dikonfirmasi dengan jawaban mayoritas sampel penelitian terhadap pernyataan

pada indikator fleksibilitas sistem. Penggunaan SIMDA BMD memang masih memiliki keterbatasan akses, dimana pengunaan SIMDA hanya dapat dilakukan di BPKAD saja selaku penatausahaan barang milik daerah. Hal inilah yang menyebabkan minimnya frekuensi penggunaan SIMDA oleh aparatur yang berdampak juga terhadap peran SIMDA dalam pencegahan *fraud* . Oleh karena itu, hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Hiyari et al., 2013), (Rapina, 2014), dan (Fitriati & Mulyani, 2015). Namun, keseluruhan penelitian terdahulu yang tersebut tidak ada yang spesifik mengaitkan hubungan antara penggunaan SIMDA atau sistem informasi terhadap pencegahan *fraud*. (Al-Hiyari et al., 2013) misalnya membahas tentang efek dari penggunaan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dalam penelitian (Fitriati & Mulyani, 2015) dan (Rapina, 2014). Oleh karena itu, pada penelitian mencoba untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan SIMDA terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengujian ini merujuk pada pernyataan (Al-Zwyalif, 2015) yang menyatakan bahwa pencegahan terhadap suatu kecurangan dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian salah satunya dengan penggunaan SIMDA.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin menurun tindakan *fraud* dalam pengelolaan barang milik daerah. Artinya, sistem pengendalian intern tersebut memiliki hubungan searah dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan barang milik

daerah. Jika penerapan sistem pengendalian intern semakin efektif maka pencegahan *fraud* akan semakin kuat.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-statistik dari variabel eksogen sistem pengendalian internal adalah 3,536 dengan nilai p *value* sebesar 0,000. Sementara, kriteria pengujian hipotesis yang diterima pada derajat kepercayaan 95% dan alpa (α) 5% adalah nilai t-statistik > 1,96 dan nilai dari p *value* < 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dinyatakan diterima. Artinya, sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah.

Arah hubungan antara variabel eksogen sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* dapat dilihat pada nilai koefisien parameter sebagaimana ditunjukkan juga pada tabel 4.19. Berdasarkan tabel tersebut hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen adalah searah dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,564 ke arah positif. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara model penelitian yang dirancang sebelumnya dengan hasil pengujian hipotesis.

Hasil ini mengkonfirmasi pernyataan dari (CIMA, 2008) bahwa terdapat dua elemen utama dalam mengatasi *fraud* yaitu perbaikan etika dan penguatan sistem pengendalian internal. Penelitian ini juga menguatkan teori *fraud pentagon*, yang menyatakan bahwa terdapat lima unsur yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi. Faktor kesempatan dalam teori tersebut

disebabkan salah satunya oleh lemahnya sistem pengendalian intern yang ada di dalam organisasi tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa fakta yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatur tentang sistem pengendalian internal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kedua, bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memulai gerakan zona integrasi yang ditandai dengan penguatan dari sisi standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang dimiliki oleh organisasi tersebut yang bersifat terbuka dan transparan. Selain itu, salah satu bentuk dari pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam SPIP, Pemerintah Daerah juga menerapkan *whistelblowing system* atau layanan pengaduan.

Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian terdahulu antara seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyetti, 2009), (Junaidi, 2017), (Handayani et al., 2017) dan (Nurhasanah, 2017) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berperan dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi terjadinya *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Prawira et al., 2014), (Meliany & Hernawati, 2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki hubungan negatif dengan tindakan *fraud*. Artinya, semakin kuat sistem pengendalian intern maka semakin kecil kesempatan melakukan tindakan *fraud*.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis, praktis dan kebijakan. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian tentang *fraud* dan sistem pengendalian intern dalam bidang kajian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga memperkuat teori *fraud pentagon* yang dikemukan oleh Marks. Dimana, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi. Kelima faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Guna meminimalisir motivasi tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan penguatan sistem pengendalian intern. Selain itu, penelitian ini juga mendukung teori birokrasi yang dikemukan oleh Weber, dimana birokrasi akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pelayanan manakala aparatur tersebut memiliki kompetensi teknis sesuai dengan deskripsi pekerjaanya.

Implikasi praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah memiliki kompleksitas yang sangat tinggi dan jangka waktu yang lama serta resiko yang besar. Kompleksitas pengelolaan barang karena proses yang panjang mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan penghapusan. Dimana siklus (perencanaan sampai penghapusan) ini tidak akan selesai dari satu periode pembukuan saja. Selain itu, terdapat beberapa jenis barang milik daerah yang sifatnya sangat *mobile* seperti kamera, laptop, motor dsb. yang memiliki resiko hilang yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur yang energik dan memiliki integritas tinggi yang seharusnya ditempatkan sebagai pengurus barang

disetiap organisasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hipotesis kualitas aparatur dan SIMDA ditolak, yang berarti bahwa kualitas aparatur dan SIMDA tidak signifikan pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kompetensi teknis yang dimiliki oleh pengurus barang disebabkan oleh minimnya pelatihan ataupun *workshop* penggunaan SIMDA. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar Pemerintah Daerah secara berkala menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi teknis yang dimiliki oleh pengurus barang.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan aksi pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah. Hanya saja, dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih berisikan hal-hal yang umum. Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam implementasinya, oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan setiap organisasi dapat membuat penjabaran tentang sistem pengendalian intern pemerintah ini sesuai dengan kompleksitas dan resiko organisasi yang ada pada setiap OPD. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah menyiapkan perangkat-perangkat pendukung yang khususnya terkait dengan keterbatasan akses dalam penggunaan SIMDA BMD sehingga instrument ini menjadi efektif untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* pengelolaan barang milik daerah dan memiliki kemudahan untuk diakses oleh jenjang level yang lebih tinggi di organisasi tersebut dalam rangka pengawasan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur dan SIMDA baik secara langsung dan maupun tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Hiyari et al., 2013), (Rapina, 2014), dan (Fitriati & Mulyani, 2015). Sedangkan, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu antara seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyetti, 2009), (Junaidi, 2017), (Handayani et al., 2017) dan (Nurhasanah, 2017) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berperan dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi terjadinya *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Prawira et al., 2014), (Meliany & Hernawati, 2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki hubungan negatif dengan tindakan *fraud*. Artinya, semakin kuat sistem pengendalian intern maka semakin kecil kesempatan melakukan tindakan *fraud*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan saran terhadap peneliti selanjutnya antara lain:

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, padahal dalam beberapa indikator penelitian erat kaitannya dengan hal-hal yang perlu dielaborasi dimana jawaban dengan kuesioner mungkin saja menjadi bias. Peneliti selanjutnya diharapkan memperkaya metode yang digunakan dalam pengumpulan data atau merubah jenis

penelitian yang digunakan menggunakan metode campuran atau studi kasus untuk menganalisis efektifitas pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi.

Beberapa hasil penelitian sesuai dengan model penelitian, namun hasil penelitiannya tidak berpengaruh secara signifikan antara lain: kualitas aparatur, SIMDA BMD, maupun kualitas aparatur melalui SIMDA. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih selektif dalam menentukan variabel laten, indikator variabel laten sampai kepada butir pernyataan yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian berdasarkan telaahan dari kajian teoritis dan penelitian terdahulu.

Sampel penelitian yang digunakan masih sangat minim, karena dibatasi oleh geografis dan nilai asset yang dikelola. Sehingga mungkin saja generalisasi dari hasil penelitian akan berbeda jika kriteria yang digunakan dihilangkan. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas sampel penelitian dengan tidak hanya melibatkan lebih banyak unsur dalam pengelolaan barang milik daerah seperti Pejabat Teknis Penatausahaan Barang, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.

REFRENSI

Albrecht, W., Howe, K., & Romney, M. (1984). Dettering Fraud: The Internal Auditor's Perspective. *The Institute of Internal Auditor's Research Foundation*.

Al-Hiyari, Al-Mashregy, & Mat, N. (2013). Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia. *American Journal of Economics*, *3*(1), 27–31. https://doi.org/10.5923/j.economics.20130301.06

Al-Zwyalif, I. M. (2015). The Role of Internal Control in Enhancing Corporate Governance: Evidence from Jordan. *International Journal of Business and Management*, *10*(7), 57–66. https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n7p57

CIMA. (2008). Fraud risk management: A guide to good practice. *Chartered Institute of Management Accountants*, 1–80.

Cressey, D. R. (1950). *The Criminal Violation of Financial Trust*. *15*(6), 738–743.

F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). In *European Business Review* (Vol. 26). https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128

Fitriati, A., & Mulyani, S. (2015). Factors that affect accounting information system success and its implication on accounting information quality. *Asian Journal of Information Technology*, Vol. 14, pp. 154–161. https://doi.org/10.3923/ajit.2015.154.161

Handayani, H., Tarjo, T., & Rimawati, Y. (2017). Correlation of Financial Statement Components in Detecting Financial Fraud. *Asia Pacific Fraud Journal*, *1*(2), 275. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.22

Hermiyetti. (2009). Pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang. *Stekpi Jakarta*, *13*(4), 29–39.

Junaidi, J. (2017). Analysis of the Role of Bpk in Preventing and Eradicating Corruption (a Study in 4 Districts in South Sulawesi Province. *Asia Pacific Fraud Journal*, *1*(2), 205. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.18

Marks, J. T. (2009). Playing offense in a high-risk environment. *Crowe Horwath*, *94*(8), 14. Retrieved from http://0-search.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=44618947&site=ehost-live

Meliany, L., & Hernawati, E. (2013). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan*.

Nurhasanah, N. (2017). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi Dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/ Lembaga). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, *2*(1), 27. https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.35

Prawira, I. M. D., T.Herawati, N., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *2*(1).

Puspasari, N. (2017). Fraud Theory Evolution and Its Relevance To Fraud Prevention in the Village Government in Indonesia*. *Asia Pacific Fraud Journal*, *1*(2), 177. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15

Ramamoorti, S. (2003). *Chapter 1 Internal Auditing : History , Evolution , And ProspectS*. Florida: The Institute of Internal Auditors.

Rapina. (2014). Factors Influencing The Quality of Accounting Information System And Its Implications on The Quality of Accounting Information. *Research Journal of Finance and Accounting*, *5*(2), 148–154.

Sudarmono, Sarwandi, T., & Yulianto, A. (2008). *Fraud Auditing.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Sudarso, d. (2009). *Teori Administrasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Undang, U. (2014). *Pemerintah Daerah.* Jakarta: Republik Indonesia.